



2025



**LAPORAN
KEBERLANJUTAN**

***SUSTAINABILITY
REPORT***

PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	7
2.1. Kinerja Ekonomi	7
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	10
2.3. Kinerja Sosial	11
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	13
3. Profil Bank	18
4. Penjelasan Direksi	21
5. Tata Kelola Keberlanjutan	29
Umpan Balik	36

Kata Pengantar

Di tahun 2025, BPR Artha Mranggenjaya telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR Artha Mranggenjaya menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).



BPR Artha Mranggenjaya sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR Artha Mranggenjaya berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya

adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR – *Sustainability Report*) BPR Artha Mranggenjaya Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR Artha Mranggenjaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk kedua kalinya menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara parallel run yaitu melalui APOLO dan luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April 2026. Dengan demikian BPR Artha Mranggenjaya menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

1.

Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/ BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (*Sustainability Report*) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/ BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS

4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR Artha Mranggenjaya tahun 2025 disusun dengan mengakomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. BPR Artha Mranggenjaya membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR Artha Mranggenjaya tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik– topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu– isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR Artha Mranggenjaya serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR Artha Mranggenjaya adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR Artha Mranggenjaya dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ;** Kami telah memiliki prinsip kehati– hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko–risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan

sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.

5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Artha Mranggenjaya <https://www.bpramj.com>
6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Artha Mranggenjaya.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan

lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*) . Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR Artha Mranggenjaya mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT”.
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.



2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)			
Total Aset	39.283.929.991	45.122.873.110	44.260.723.005
Aset Produktif	37.988.796.775	40.958.691.727	42.395.068.672
Kredit/Pembiayaan Bank	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093
Dana Pihak Ketiga	30.625.959.879	34.547.020.426	31.862.427.923
Pendapatan Operasional	5.546.071.140,38	7.987.718.098	7.599.091.823,36
Beban Operasional	7.957.053.523,94	7.396.388.792	7.340.301.629,64
Lab Bersih	-2.679.933.612,56	384.866.346	165.160.719,72
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	14,20	18,95	19,35
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	41,80	26,74	20,54
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	100	100	100
NPL/NPF Nett	49,05	33,93	29,21
Return on Asset (ROA)	-6,48	1,03	0,53
Return on Equity (ROE)	-71,35	6,39	2,87
Net Interest Margin (NIM)	7,58	10,44	10,50
Rasio Efisiensi (BOPO)	143,47	92,60	96,59
Loan to Deposit Ratio (LDR)	101,80	82,14	80,72

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	5	5	5	5
a.1. DPK	5	5	5	5
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
b.1. Kredit / Pembiayaan	2	2	2	2
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	37.576.737.290	30.625.959.879	34.547.020.426	31.862.427.923
a.1. DPK	37.576.737.290	30.625.959.879	34.547.020.426	31.862.427.923
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	39.580.054.243	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093
b.1. Kredit / Pembiayaan	39.580.054.243	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	37.576.737.290	30.625.959.879	34.547.020.426	31.862.427.923
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	39.580.054.243	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	100%	100%	100%	100%
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	100%	100%	100%	100%
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	39.580.054.243	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	39.580.054.243	31.177.959.018	35.133.044.512	33.759.997.093

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



BPR Artha Mranggenjaya mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR Artha Mranggenjaya tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Lingkungan kerja yang layak dan nyaman sangat diperlukan guna menjaga dan meningkatkan produktifitas dari para pegawai. Untuk itu BPR Artha Mranggenjaya selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang memadai diantaranya :

- Menyediakan ruangan ber AC di setiap ruangan kerja
- Setiap Gedung baik kantor pusat, cabang dan kantor kas sudah dilengkapi dengan APAR
- Memberikan jaminan pemeliharaan Kesehatan dan kecelakaan kerja guna memberikan rasa aman kepada para pegawai
- Selain itu BPR Artha Mranggenjaya juga terus menumbuhkan budaya hemat energy kepada seluruh karyawan :
- Hemat penggunaan Listrik dengan selalu mewajibkan karyawan untuk mematikan peralatan elektronik dan lampu jika tidak digunakan dan mewajibkan setiap karyawan untuk memastikan seluruh peralatan elektronik dan lampu telah mati sebelum pulang kerja
- Pemakaian kertas bekas yang masih dapat digunakan
- Penyimpanan data secara digital, dimana untuk data – data yang tidak perlu untuk disalin ke kertas untuk disimpan dalam bentuk file digital
- Mengganti lampu non LED menjadi lampu LED
- Kampanye pengurangan sampah plastic, penghematan penggunaan tisu dan air

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	5.123	5.123	5.015	5.287
b. Penggunaan Listrik (kWh)	43.048	43.048	44.418	38.620
c. Penggunaan Air (m3)	771	771	930	958
d. Penggunaan Kertas (kg)	184	184	241	230

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

BPR Artha Mranggenjaya berkomitmen memberikan layanan yang transparan kepada nasabah terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya serta syarat dan ketentuan yang melekat pada produk.

Beberapa langkah – langkah yang dilakukan BPR dalam menerapkan transparansi produk dan layanan antara lain :

- a. Menyampaikan informasi produk dan layanan secara akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan
- b. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami

- c. Menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan layanan secara tertulis yang memuat sekurang – kurangnya manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum

BPR Artha Mranggenjaya rutin melaksanakan kegiatan inklusi keuangan pada tahun 2025 dengan tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk, layanan serta topik Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan inklusi keuangan rutin dilakukan di sekolah – sekolah, pasar dan perkumpulan – perkumpulan seperti Perkumpulan Arisan atau Perkumpulan Desa.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referal Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di kota Demak. BPR Artha Mranggenjaya selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui remunerasi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Remunerasi diberikan sebagai bentuk penghargaan dari Perusahaan kepada pegawai dalam hal upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pegawai.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	42	42	48	43
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	4	3	3	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	4	3	3	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	-	-	-	-
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPR ARTHA MRANGGENJAYA ikut berkontribusi dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang searah dengan program Keuangan Berkelanjutan yang disalurkan ke berbagai segmen diantaranya :

- a. Pendidikan
- b. Bantuan bencana alam
- c. Kesehatan
- d. Keagamaan
- e. Pemuda dan Olahraga

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	12.000.000	10.190.750	8.173.300	10.624.000
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR Artha Mranggenjaya senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR Artha Mranggenjaya melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun Produk BPR Artha Mranggenjaya diantaranya :

1. Simpanan

Terdiri dari Deposito, Tabungan Umum, Tabungan Siswa, Tabungan Wajib dan Tabungan Qurban

a. Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka nasabah perorangan maupun badan usaha (Perusahaan/ Organisasi/ Yayasan) yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang disepakati, dengan persyaratan tertentu oleh pihak Bank baik secara tunai maupun pemindahbukuan dan atas simpanan tersebut Bank memberikan jasa imbalan jasa

berupa bunga, uang besarnya ditentukan oleh Bank dan dibayarkan pada saat jatuh tempo di bulan berikutnya.

b. Tabungan Umum

Tabungan Umum adalah bentuk simpanan pihak ketiga yang diperuntukkan bagi Masyarakat umum yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank, baik secara tunai ataupun pemindahbukuan dengan menggunakan slip yang sudah ditentukan dan sudah terdaftar atas nama pemilik rekening. Atas simpanan tersebut Bank memberikan imbalan berupa Bunga, yang besarnya ditentukan oleh Bank dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

c. Tabungan Siswa

Tabungan Siswa adalah bentuk simpanan pihak ketiga yang diperuntukkan bagi siswa sekolah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank, baik secara tunai ataupun pemindahbukuan dengan menggunakan slip yang sudah ditentukan dan sudah terdaftar atas nama pemilik rekening. Atas simpanan tersebut Bank memberikan imbalan berupa Bunga, yang besarnya ditentukan oleh Bank dan dibayarkan pada setiap akhir bulan.

d. Tabungan Wajib

Tabungan Wajib adalah bentuk simpanan pihak ketiga yang diperuntukkan bagi debitur yang mengambil kredit/ simpanan. Yang penarikannya dapat dilakukan setelah kredit tersebut lunas berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank, baik secara tunai ataupun pemindahbukuan dengan menggunakan slip yang sudah ditentukan dan sudah terdaftar atas nama pemilik rekening.

e. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah bentuk simpanan pihak ketiga yang diperuntukkan bagi Masyarakat umum yang penarikannya dapat dilakukan sebelum Idul Adha berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank, baik secara tunai ataupun pemindahbukuan dengan menggunakan slip yang sudah ditentukan dan sudah terdaftar atas nama pemilik rekening.

2. Kredit

a. Kredit Umum

Kredit umum adalah bentuk pinjaman yang diperuntukkan untuk Masyarakat umum baik secara perorangan maupun badan usaha (Perusahaan / Organisasi / Yayasan) yang system angsuran pokok dan bunganya dibayarkan setiap bulan berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank.

b. Kredit Berjangka

Kredit umum adalah bentuk pinjaman yang diperuntukkan untuk Masyarakat umum baik secara perorangan maupun badan usaha (Perusahaan / Organisasi / Yayasan) yang system angsuran bunganya dibayarkan setiap bulan sedangkan angsuran pokok dibayarkan pada

saat jatuh tempo kredit berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak Bank.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR Artha Mranggenjaya telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, BPR Artha Mranggenjaya secara kontinyu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR Artha Mranggenjaya juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Artha Mranggenjaya telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Artha Mranggenjaya akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Artha Mranggenjaya pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR Artha Mranggenjaya maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Artha Mranggenjaya belum melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Alamat	JI Raya Mranggen No 200 Mranggen Demak
Nomor Telepon	024 6725500
Email	bpr_amj@yahoo.com; sekretaris@bpramj.id
Website	www.bpramj.com

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp 39,283 Milyar mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Demikian juga kewajiban mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp 34,788 milyar.

Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Aset	44.260.723.005	45.122.873.110	39.283.929.991
Total Kewajiban	38.099.731.245	38.577.015.004	34.788.005.498
Dana Pihak Ketiga	31.862.427.923	34.547.020.426	30.625.959.879

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 42 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Kota Demak. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

Nama Pemilik	Nominal	Lembar Saham	%
Antonius Andy Wibowo, ST	1.455.000.000	1.455	55,32%
Chatarina Suryati, S.Pd	200.000.000	200	7,60%
Indah Sri Oetami	240.000.000	240	9,13%
Asnan Saleh	140.000.000	140	5,32%
Ir. Nanda Setiawan	54.000.000	54	2,05%
Aji Prayitno, S.Pd	347.000.000	347	13,19%
Windarti	37.000.000	37	1,41%
Feri Atmadi	37.000.000	37	1,41%
Gunarso Wibisono	35.000.000	35	1,33%
Drs. Herry Nuryanto	29.000.000	29	1,10%
Dra. Y Titik Haryati, M.Si	26.000.000	26	0,99%
Eny Wijastuti	15.000.000	15	0,57%
Agus Santosa	15.000.000	15	0,57%
Jumlah	2.630.000.000	2.630	100,00%



Produk dan Layanan

Produk yang disediakan oleh BPR ARTHA MRANGGENJAYA sesuai informasi pada tabel berikut ini.

Jenis Produk	Deskripsi
Simpanan	Deposito
Tabungan	Tabungan Umum
	Tabungan Siswa
	Tabungan Wajib
	Tabungan Qurban
Kredit	Kredit Umum
	Kredit Berjangka

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang terbaik, dikelola secara Profesional, Tangguh, Dipercaya untuk melayani usaha mikro dan kecil dengan pelayanan yang prima.

b. Misi Keberlanjutan

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
2. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan BPR kepada UMK dan Masyarakat setempat.
3. Menjadikan BPR dengan tata kelola yang baik, efektif, efisien dan kompetitif yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja.
4. Membangun Good Corporate Government (GCG) yang lebih baik sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelayanan.
5. Menjalin hubungan sinergi yang harmonis antara pemegang saham, pengurus, karyawan dan nasabah untuk mewujudkan BPR yang terpercaya.
6. Menjadikan BPR yang sehat dan bisa memberikan nilai lebih baik dan menguntungkan bagi stakeholder serta mempunyai kepedulian sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat

Penjelasan Lainnya

BPR ARTHA MRANGGENJAYA mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan.

4.

Penjelasan Direksi

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional Perbankan Hijau (*green banking*).

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, BPR Artha Mranggenjaya belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR Artha Mranggenjaya kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama- sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR Artha Mranggenjaya. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala dalam implementasi keuangan berkelanjutan pada BPR Artha Mranggenjaya seringkali berhubungan dengan kemampuan internal organisasi untuk beradaptasi dari fokus laba instan menjadi perkembangan yang menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple bottom line).

2. Operasional Bank

Dilihat dari sudut pandang operasional BPR Artha Mranggenjaya, kesulitan utama dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan terletak pada bagaimana prinsip- prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) diimplementasikan dalam kegiatan sehari- hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian kredit, pelayanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Seringkali, terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

BPR Artha Mranggenjaya belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang secara jelas dan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. BPR ARTHA MRANGGENJAYA menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai spesialis ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau *Sustainability Officer*. Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial. Analisis kredit umumnya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa menilai potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, atau kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

5. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah profil dan kesiapan debitur. Mayoritas nasabah BPR berasal dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

Bagi BPR Artha Mranggenjaya menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen manajemen

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. *Tone from the top* (sikap, tindakan, dan perilaku etis dari pemimpin tertinggi organisasi dewan direksi, manajemen senior) penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar proyek tambahan

2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana

BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, misalnya daftar sektor yang dibatasi, klasifikasi risiko rendah-tinggi, serta *checklist* singkat bagi account officer. Pendekatan ini membuat implementasi lebih mudah diterapkan.

3. Peningkatan kapasitas SDM

Dilakukan melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.

4. **Integrasi ke proses kredit**

Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.

5. **Pengembangan produk dan insentif**

Misalnya pemberian suku bunga atau persyaratan yang lebih baik bagi usaha yang menjalankan praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi.

6. **Peningkatan kualitas data dan pelaporan**

Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan *template* manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.

7. **Edukasi dan pendampingan nasabah**

Karena banyak debitur belum memahami isu keberlanjutan, bank dapat memberikan sosialisasi ringan mengenai manfaat praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.

8. **Kerja sama dengan pihak eksternal**

BPR dapat menggandeng dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping guna membantu penilaian maupun pembinaan debitur.

9. **Implementasi bertahap berbasis prioritas**

Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada BPR Artha Mranggenjaya tidak harus langsung sempurna. Fokus dapat dimulai dari sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling memungkinkan di wilayah kerja.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. **Kebijakan Pemerintah**

Dari sisi eksternal, khususnya yang bersumber dari kebijakan dan lingkungan regulasi pemerintah dan regulator, BPR Artha Mranggenjaya sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain berikut.

1) **Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat.**

Ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau terus berkembang. BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.

2) **Kebutuhan pelaporan yang semakin detail.**

Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, ini menjadi beban tambahan.

- 3) **Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum.**
Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan atau interpretasi khusus.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar BPR Artha Mranggenjaya menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.



Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

Pertama, ketergantungan pada sektor tertentu yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Peralihan menuju praktik yang lebih hijau membutuhkan biaya dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan berkelanjutan belum tumbuh cepat.

Kedua, kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Pada level regional, variasi kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat memengaruhi. Banyak daerah menghadapi keterbatasan akses teknologi hijau, minimnya konsultan atau lembaga pendukung, serta belum berkembangnya rantai pasok yang berkelanjutan.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

Tingkat Global

Di tingkat global, tekanan datang dari perubahan standar, pasar, dan risiko lintas negara.

Ada peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan ketidakpastian investasi.

Selain itu, muncul risiko akses pendanaan internasional yang semakin mensyaratkan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan tertentu.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

3. Lainnya

1. Ciri khas dan kematangan nasabah. Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.
2. Pandangan dan penolakan dari pihak peminjam. Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Artha Mranggenjaya menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/ perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh BPR Artha Mranggenjaya antara lain:

1. Edukasi dan literasi kepada nasabah.
BPR dapat melakukan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, manfaat legalitas, serta potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.
2. Pendampingan UMKM.
Tidak cukup hanya meminta dokumen; bank membantu debitur memahami apa yang perlu diperbaiki. Misalnya arahan pengelolaan limbah sederhana, keselamatan kerja, atau cara memperoleh izin usaha.
3. Membangun kemitraan lokal.
Kerja sama dengan dinas pemerintah daerah, koperasi, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping dapat membantu penyediaan informasi teknis dan pembinaan tanpa seluruh beban ada pada bank.
4. Mengembangkan produk yang realistis dengan pasar.
Daripada menunggu proyek hijau besar, BPR dapat mendorong pembiayaan yang berdampak sederhana namun nyata, seperti pembiayaan terhadap Kegiatan UMKM, efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, atau pengurangan limbah.
5. Peningkatan komunikasi dengan regulator.
Melalui forum industri atau asosiasi, BPR dapat memperoleh klarifikasi, berbagi praktik baik, serta menyampaikan kendala lapangan sehingga implementasi lebih sesuai dengan kapasitas.
6. Penyederhanaan persyaratan.
Agar tidak menghambat minat debitur, bank dapat menggunakan checklist atau klasifikasi risiko yang proporsional terhadap skala usaha.
7. Penguatan reputasi dan komunikasi publik.
Dengan menunjukkan komitmen pada pembiayaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik nasabah yang sejalan

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG – *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan BPR Artha Mranggenjaya sebagaimana adalah sebagai berikut:

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*framework*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.

- 2) Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
- 3) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
- 4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
- 2) Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
- 3) Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
- 4) Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
- 5) Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.



Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR Artha Mranggenjaya berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Artha Mranggenjaya secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR Artha Mranggenjaya. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	1
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	-	-

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	2	2	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	2	2	2

Guna Meningkatkan kompetensi dalam bidang Keuangan Berkelanjutan maka BPR Artha Mranggenjaya senantiasa mengadakan kegiatan baik berupa pelatihan maupun sosialisasi – sosialisasi dalam rangka penguatan baik tingkat Komisaris, Direksi, Tim Aksi Keuangan Berkelanjutan hingga seluruh karyawan yang ada di BPR Artha Mranggenjaya. Untuk mencapai target kinerja Keuangan Berkelanjutan, BPR Artha Mranggenjaya terus menerapkan strategi pencegahan risiko antara lain dengan menanamkan pemahaman Keuangan Berkelanjutan pada seluruh karyawan melalui sosialisasi dalam mengurangi pemakaian Listrik, ATK serta penghematan air, BBM serta menjaga kebersihan kantor.



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, peran pemegang saham di BPR Artha Mranggenjaya menentukan arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham BPR Artha Mranggenjaya yang tinggi mendorong BPR Artha Mranggenjaya untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan BPR Artha Mranggenjaya menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu BPR Artha Mranggenjaya menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Akademisi

1. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR Artha Mranggenjaya menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
2. Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi BPR Artha Mranggenjaya dalam menyusun kebijakan.

Praktisi

BPR Artha Mranggenjaya juga melakukan *sharing experience* dengan praktisi perbankan yang lebih awal dan berpengalaman dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan Pengalaman dari bank atau lembaga lain membantu BPR Artha Mranggenjaya memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan ESG tanpa membebani operasional.

Pegawai

Dalam penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Artha Mranggenjaya, pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, nasabah bukan hanya penerima Kredit / Pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh kredit pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di BPR Artha Mranggenjaya.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR. Melalui forum ini, bank dapat memperoleh contoh implementasi termasuk melaksanakan gerakan menanam 1.000 pohon Kelapa, mengikuti pelatihan bersama, dan menyuarkan kendala kepada regulator.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Artha Mranggenjaya yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Artha Mranggenjaya menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR ARTHA MRANGGENJAYA memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Bapak Didik Setyawan
Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko

PT BPR Artha Mranggenjaya
Jl Raya Mranggen No 200 Mranggen Demak
Telp. (024) 6710026
Email. bpr_amj@yahoo.com; sekretaris@bpramj.id

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kalinya. Untuk Laporan Keberlanjutan sebelumnya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan, meskipun demikian Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.



LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Direksi	2	0	2	4.9%
2	Pejabat Eksekutif	4	5	9	22%
3	Pelaksana	14	1	15	36.6%
4	Lainnya / Tidak Terdefinisi	7	8	15	36.6%
	Jumlah	27	14	41	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Pascasarjana	0	2	2	4.9%
2	Sarjana	18	8	26	63.4%
3	Diploma	2	3	5	12.2%
4	Sma Atau Sederajat	7	1	8	19.5%
	Jumlah	27	14	41	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Kontrak	14	1	15	36.6%
2	Tetap	10	13	23	56.1%
3	Outsource	3	0	3	7.3%
	Jumlah	27	14	41	100%



PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
JI Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak
Telepon: (024)6710026
Website: www.bpramj.com, Email: bpr_amj@yahoo.com

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 50 Tahun	5	3	8	19.5%
2	41 s/d 50 Tahun	13	6	19	46.3%
3	31 s/d 40 Tahun	8	5	13	31.7%
4	21 s/d 30 Tahun	1	0	1	2.4%
	Jumlah	27	14	41	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Generation X 1965 - 1980	15	5	20	48.8%
2	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	11	9	20	48.8%
3	Generation Z 1997 - 2012	1	0	1	2.4%

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Demak, 15 April 2026

PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA



Eric Widya Budi Pramana, SE
Direktur



M Zakky Faesal, ST
Direktur Utama



Antonius Andy Wibowo, ST
Komisaris Utama



Nomor : 205/BPR-AMJ/DIR/IV/2025
Tanggal : 16 April 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Regional 3 Jawa Tengah dan DIY
Jl Kyai Saleh No. 12-14 Mugasari Semarang
Jawa Tengah 50249

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : **Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA Tahun 2025**

Mengacu pada POJK No. 51 Penerapan Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif ditegaskan BPR wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Oleh karenanya, menunjuk perihal dimaksud kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA

PT BPR Artha Mranggenjaya



M Zakky Faesal, ST
Direktur Utama